

**ESKALASI KONFLIK POLITIK DALAM KEPENGURUSAN DPD
PARTAI HANURA SUMATERA BARAT
TAHUN 2018-2020**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Nama : Akmal Arianto
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Eskalasi Konflik Politik Dalam Kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat Tahun 2018-2020

Penelitian ini membahas tentang eskalasi konflik politik pada kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat tahun 2018-2020. Konflik terjadi karena perpecahan Hanura di tingkat nasional sampai pada kepengurusan di Sumatera Barat (Sumbar). DPD Hanura Sumbar di bawah pimpinan Marlis merupakan provokator dalam konflik politik. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor penyebab dan pola eskalasi konflik dengan menggunakan teori institusionalisasi partai politik dan eskalasi konflik. Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan terkait faktor penyebab konflik politik. *Pertama* adanya rasa ketidakpercayaan pengurus DPD Hanura Sumatera Barat terhadap kepemimpinan ketua umum. *Kedua* dilihat dari pendekatan struktural, konflik muncul akibat tidak tersedianya kebijakan atau aturan untuk mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan. *Ketiga* semakin kuatnya sentimen kader senior yang berjasa dengan kader karbitan. *Keempat* peran kelompok eksternal dalam memanipulasi konflik dengan menambahkan kepentingan mereka dalam kelompok yang berkonflik. Eskalasi konflik di DPD Hanura Sumatera Barat mencapai puncaknya pada masa pemecatan 10 anggota DPRD dari kubu Marlis. Tingginya tingkat konflik terjadi disebabkan pergantian kepemimpinan dan isu pembangkangan yang berimplikasi pada lambannya upaya mediasi dan penyelesaian konflik berkaitan dengan peran aktor (provokator dan spekulan) dalam konflik yang terjadi di kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat. Konflik yang terjadi di internal partai sangat mempengaruhi hasil perolehan suara partai pada Pemilu tahun 2019. Hanura harus kehilangan kursi di DPRD Provinsi dan beberapa DPRD Kabupaten dan Kota. Di sisi lain konflik ini, juga berdampak baik dalam hal kelembagaan dan pengembangan struktur organisasi partai sampai tingkat anak ranting. Selain itu, pengurus DPD yang baru mampu melaksanakan agenda kaderisasi pratama yang belum pernah dilakukan, sejak 12 tahun Partai Hanura berdiri di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Eskalasi, Konflik Politik, Implikasi.

ABSTRACT

Name : Akmal Arianto
Study Program : Master of Political Science
Title : Escalation of Political Conflict in the Management of the West Sumatra Hanura Party DPD in 2018-2020

This study discusses the escalation of political conflict in the management of the West Sumatra Hanura Party DPD in 2018-2020. The conflict occurred because of the split of Hanura at the national level and reached the management in West Sumatra. DPD Hanura West Sumatra under the leadership of Marlis is a provocateur in political conflicts. The purpose of this study is to describe the causal factors and patterns of conflict escalation using the theory of institutionalization of political parties and conflict escalation. This study resulted in several conclusions related to the factors causing political conflict. First, there is a sense of distrust of the West Sumatra Hanura DPD management towards the leadership of the general chairman. Second, viewed from the structural approach, conflicts arise due to the unavailability of policies or rules to accommodate the aspirations of stakeholders. Third, the stronger sentiment of senior cadres who have contributed to karbitan cadres. Fourth, the role of external groups in manipulating conflict by adding to their interests in the conflicting group. The escalation of the conflict in the Hanura DPD, West Sumatra, reached its peak during the dismissal of 10 DPRD members from the Marlis camp. The high level of conflict occurs due to changes in leadership and issues of disobedience which have implications for the slow pace of mediation and conflict resolution efforts related to the role of actors (provocators and speculators) in conflicts that occur in the management of the West Sumatra Hanura Party DPD. Conflicts that occurred within the party greatly affected the results of the party's vote in the 2019 election. Hanura had to lose his seat in the Provincial DPRD and several Regency and City DPRDs. On the other hand, this conflict also had a good impact in terms of institutions and the development of the party's organizational structure to the sub-branch level. In addition, the new DPD management is able to carry out the primary cadre agenda which has never been carried out, since 12 years the Hanura Party was founded in West Sumatra.

Keywords: Escalation, Political Conflict, Implications.